

Agensi Transformatif dan Politik Pengakuan: Studi Atas Kepemimpinan Kepala Desa Perempuan di Purwo Bhakti, Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi

Muhammad Nurun Najib^{1*}

¹ Sosiologi, Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia (UNUSIA), Jakarta

Korespondensi: * najib@unisia.ac.id

 <https://doi.org/10.47266/bwp.v8i3.422> | halaman: 485 – 498

Dikirim: 21-07-2025 | Diterima: 24-09-2025 | Dipublikasikan: 30-11-2025

Abstrak

Penelitian ini membahas praktik kepemimpinan kepala desa perempuan dalam konteks transformasi sosial dan politik pengakuan di tingkat lokal. Studi ini berfokus pada Kepala Desa Purwo Bhakti, Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi, yang menunjukkan pola kepemimpinan kolaboratif, etis, dan inklusif. Melalui pendekatan kualitatif dan desain studi kasus, data dikumpulkan melalui observasi partisipatif, wawancara mendalam, dan telaah dokumen desa. Hasil studi menunjukkan bahwa kepemimpinan kepala desa perempuan tidak hanya memperluas ruang partisipasi bagi kelompok rentan, tetapi juga membentuk ulang struktur sosial yang selama ini cenderung maskulin dan eksklusif. Dengan memobilisasi modal sosial, etika kepedulian, serta strategi simbolik, ia menciptakan ruang publik yang lebih adil dan terbuka. Dalam kerangka sosiologi kritis, praktik ini dibaca sebagai bentuk agensi transformatif yang bekerja melalui logika pengakuan dan redistribusi, bukan semata-mata otoritas formal. Studi ini menegaskan bahwa kepemimpinan perempuan tidak sekadar menjadi simbol representasi, tetapi sebagai motor perubahan yang membentuk konfigurasi baru dari relasi kuasa, legitimasi sosial, dan produksi ruang demokratis di tingkat desa.

Kata kunci: kepemimpinan perempuan; inklusi sosial; transformasi sosial.

I. Pendahuluan

Salah satu indikator penting dalam penguatan demokrasi dan tata kelola pemerintahan yang inklusif dan partisipatif dapat ditandai dengan adanya keterwakilan perempuan dalam ranah politik lokal. Misalnya pada level pemerintahan desa, keterlibatan perempuan selain juga dijadikan sebagai pijakan normatif, juga turut menjadi cerminan pergeseran struktur kuasa yang lebih luas. Meskipun keterlibatan perempuan juga telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, namun fakta di lapangan menunjukkan bahwa nafas transformasi tersebut masih belum merata. Data yang dirilis Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal menunjukkan bahwa sampai pada tahun 2022 jumlah kepala desa perempuan di Indonesia masih tercatat 4.120 atau sekitar 5,5% dari total kepala desa di Indonesia yang berjumlah 74.961. Jika kita merujuk pada angka partisipasi perempuan pada perangkat desa, nilainya akan jauh lebih tinggi, yaitu sebanyak 149.891 atau sekitar 22.1% dari total 677.335 perangkat desa seluruh Indonesia.

Jika kita bandingkan dengan negara-negara ASEAN, proporsi Indonesia atas kepemimpinan perempuan juga menjadi tantangan tersendiri. Misalnya saja di Vietnam, hasil survei UNDP-PAPI (2019) menunjukkan sekitar 12% desa yang dipimpin oleh perempuan (UNDP, 2022). Di Filipina angkanya semakin rendah. Data lapangan menunjukkan bahwa proporsi *punong barangay* atau kepala kampung yang perempuan hanya sekitar 4-5% di beberapa distrik (Rodil et al., 2019). Sementara Malaysia menetapkan target kebijakan bahwa 30% posisi kepala kampung seharusnya diisi oleh perempuan, meskipun realisasinya masih terbatas. Perbandingan tersebut menegaskan bahwa rendahnya representasi perempuan pada posisi kepala desa bukan hanya permasalahan Indonesia, tetapi juga jamak terjadi di negara-negara ASEAN.

Permasalahan di atas menunjukkan bahwa keberadaan regulasi yang salah satunya bertujuan untuk mengafirmasi keterlibatan perempuan dalam pemerintah lokal belum secara langsung dapat mengubah praktik-praktik eksklusif. Dalam kacamata sosiologi, ketimpangan tersebut dapat dibaca sebagai bagian struktur sosial yang menormalisasi relasi patriarki dalam ranah publik. Pierre Bourdieu (1990) menjelaskannya dengan konsep *habitus*, yaitu sistem disposisi yang bekerja tak sadar dan pada akhirnya membentuk persepsi dan tindakan aktor sosial. *Habitus* patriarkal inilah yang seringkali menempatkan kepemimpinan perempuan sebagai anomali. Beberapa penelitian terdahulu juga mengonfirmasi realitas yang terjadi ini. Holilah (2014), menunjukkan bahwa kepala desa perempuan seringkali dipersepsikan sebagai sosok transisi belaka. Sementara itu, Nancy Fraser (2000) menawarkan perspektif bahwa keadilan sosial tidak hanya berbicara tentang aspek distribusi sumber daya (*redistribution*), tetapi juga adanya pengakuan identitas (*recognition*).

Dalam lanskap yang ditandai oleh rendahnya representasi perempuan, Desa Purwo Bhakti menempati posisi strategi sebagai lokus penelitian. Penelitian ini berangkat dari studi kasus atas kepemimpinan kepala desa perempuan, Lenny Maryani, di Desa Purwo Bhakti, Bungo, Jambi, yang menjalankan peran kepemimpinan secara kolaboratif, inklusif, dan transformatif. Jika dilihat dari sejarahnya, Desa Purwo Bhakti adalah desa transmigrasi dengan komposisi multi-etnis dan menjadikan ruang sosialnya relatif egaliter dan terbuka terhadap kepemimpinan non-konvensional. Tidak ada satu kelompok etnis atau otoritas adat yang mendominasi, sehingga peluang lahirnya perempuan lebih terbuka jika dibandingkan dengan desa yang memiliki struktur homogen dan patriarkal. Selain itu, dengan realitas yang

multietnis ini, kepala desa juga dituntut untuk dapat memfasilitasi ruang-ruang interaksi sosial yang adil.

Tercatat sejak tahun 2022, Desa Purwo Bhakti terpilih menjadi salah satu lokus implementasi program Desa inklusif dari Kementerian Pedesaan, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (KPDTT). Intervensi program ini pada akhirnya dikembangkan di desa tidak hanya sebatas instrumen teknokratik belaka, tetapi juga sebagai ruang sosial yang membentuk partisipasi kolektif dan ruang kesadaran sosial baru bagi seluruh warga desa tanpa terkecuali. Beberapa inisiatif yang membawa semangat nilai-nilai inklusif misalnya dengan merubah sebagian ruang kantor desa menjadi perpustakaan, menginisiasi forum-forum remaja yang seringkali kurang tersentuh dalam proses pembangunan desa, dan juga menginisiasi desa yang ramah pada kelompok disabilitas. Inisiasi-inisiasi ini dapat kita maknai sebagai simbol transformasi ruang publik menjadi lebih inklusif. Di banyak desa misalnya, kita dapat menemukan bahwa ruang pemerintahan desa (kantor desa) seringkali bersifat eksklusif dan berjarak, terlebih bagi kelompok-kelompok rentan dan marjinal. Namun di Purwo Bhakti, ruang-ruang tersebut difungsikan ulang lebih sebagai arena keterlibatan warga desa tanpa terkecuali.

Nafas sebagai kepala desa yang inklusif tidak berhenti pada aspek partisipasi sosial, tetapi juga merangkul pada aspek pemberdayaan ekonomi kelompok rentan dan marjinal, khususnya perempuan kepala rumah tangga, melalui penguatan Usaha Kecil Mikro dan Menengah (UMKM). Pemerintah Desa Purwo Bhakti juga telah turut serta memfasilitasi rantai pasok dan distribusi antarwilayah untuk menjaga keberlanjutan usaha perempuan kepala keluarga tersebut. Pendekatan yang dilakukan ini juga menjadi salah satu bukti bahwa ada sensitivitas dan keberpihakan pemerintah desa terhadap sektor ekonomi rumah tangga perempuan, yang mana selama ini sektor ini tidak begitu dilirik oleh banyak pemerintah desa karena dinilai sebagai sektor informal dan subsisten. Hal ini juga memperkuat pemahaman bersama bahwa pembangunan desa tidak selalu berkutat pada masalah infrastruktur fisik tetapi juga pada aspek penguatan ekonomi mikro berbasis kelompok rentan dan marjinal.

Berlatar belakang sebagai tenaga kesehatan ternyata juga turut mampu memberikan warna bagi kepemimpinannya sebagai Kepala Desa di Purwo Bhakti, utamanya dalam aspek gaya kepemimpinannya yang mengutamakan etika empati dan kehadiran sosial. Salah satu contoh yang dapat kita sebut diantaranya adalah dengan menjadikan ruang-ruang di kantor desa ramah bagi kelompok disabilitas serta adanya layanan berbasis kunjungan rumah yang merupakan wujud nyata dari praktik *ethics of care* (Tronto, 1993). Perspektif yang digunakan di Purwo Bhakti ini juga turut menyumbangkan pembongkaran terhadap narasi umum yang seringkali kita dengar, bahwa perempuan hanya lembut secara personal akan tetapi gagap ketika dihadapkan situasi struktural. Sebagai kepala desa perempuan, ternyata ia juga mampu menciptakan dampak struktural yang konkret melalui beragam pengaturan prioritas kebijakan publik.

Upaya untuk mewujudkan prinsip-prinsip inklusivitas juga terlihat dalam proses pembentukan kader inklusi desa yang aktif menjangkau warga desa dari kelompok-kelompok marjinal yang selama ini kurang tersentuh. Kader tersebut menjangkau rumah-rumah warga dan menjadikan forum informal sebagai ruang artikulasi kebutuhan sosial. Dengan demikian praktik-praktik implementasi nilai inklusivitas dijalankan dalam bentuk praktik sosial yang konkret dan relasional. Dalam arena politik desa, kepala desa memperlihatkan kemampuan untuk membangun koalisi lintas faksi. Ia terbukti berhasil

merangkul mantan lawan politik untuk bergabung dalam struktur pemerintahan desa sebagai bentuk rekonsiliasi politik. Dengan adanya strategi seperti ini, akan turut melahirkan tatakelola pemerintahan desa yang stabil dan inklusif. Ini sekaligus menjadi bukti bahwa inovasi sosial dan tata kelola pemerintahan tidak selalu lahir dari pusat, tetapi dapat juga lahir dari pinggiran yang digerakkan nilai-nilai lokal. Ini sekaligus menantang anggapan dominan bahwa desa hanyalah objek pembangunan yang pasif.

Dengan demikian, penelitian ini berangkat dari asumsi bahwa kepemimpinan perempuan di desa bukan sebatas permasalahan representasi numerik, tetapi juga menyangkut perubahan dalam struktur, simbol, dan relasi sosial. Studi kasus di Desa Purwo Bhakti memperlihatkan bagaimana seorang kepala desa perempuan dapat menjalankan kekuasaan secara etis, reflektif, dan produktif, serta membuka ruang inklusi yang konkret bagi kelompok rentan dan marjinal yang selama ini kurang terdengar.

II. Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus untuk memahami dinamika kepemimpinan kepala desa perempuan di Desa Purwo Bhakti, Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi, secara mendalam dan kontekstual. Studi ini bertolak dari asumsi bahwa realitas sosial tidak diletakkan sebagai entitas yang netral dan objektif, tetapi hasil konstruksi sosial yang sarat relasi kuasa, simbol, dan sejarah sosial tertentu (Guba & Lincoln, 1994). Maka yang menjadi fokus dalam studi ini selain tentang data empiris juga makna dan praktik sosial yang tersemat dalam tindakan kepala desa.

Pengumpulan data dilakukan melalui observasi langsung, wawancara mendalam, dan juga telaah dokumen desa. Observasi dilakukan secara partisipatif dan peneliti terlibat juga dalam interaksi sosial bersama warga desa, perangkat desa, dan tenaga pendamping lokal desa. Ini dimaksudkan untuk mengamati pola interaksi, distribusi pesan, serta pengambilan keputusan di ruang-ruang pemerintahan desa. Observasi ini menjadi bagian penting dalam membongkar aspek yang tidak dapat sepenuhnya diungkap melalui narasi verbal, seperti gestur kekuasaan, simbol sosial, dan dinamika ruang.

Informan dalam penelitian ini yang terdiri dari kepala desa, sekretaris desa, dua orang kepala dusun, empat orang staf administrasi, tokoh masyarakat, empat orang kader desa dan pendamping lokal desa, dan informan dari kelompok rentan yang meliputi perempuan kepala rumah tangga, penyandang disabilitas, serta kelompok remaja. Pemilihan informan dilakukan secara purposif berdasarkan keterlibatan langsung mereka dalam proses pengambilan keputusan dan program-program desa inklusif. Wawancara dilakukan untuk menggali pengalaman subjektif, narasi identitas, serta pemaknaan mereka terhadap kepemimpinan perempuan dan praktik inklusivitas di tingkat desa. Selain itu, penelitian ini juga didukung dengan studi kepustakaan (*archival research*) melalui telaah dokumen desa seperti RPJMDes, APBDes, laporan kader inklusi, serta arsip kebijakan program Desa Inklusif yang digunakan untuk memahami dimensi historis dan institusional dalam kepemimpinan perempuan.

Kerangka analisis penelitian ini menggunakan konsep habitus dan modal simbolik dari Pierre Bourdieu (1990), politik pengakuan dan redistribusi dari Nancy Fraser (2000), dan strukturasi dari Anthony Giddens (1984). Habitus akan menjelaskan bagaimana disposisi sosial dan pengalaman personal kepala desa perempuan membentuk gaya kepemimpinan

berbasis empati. Modal simbolik menunjukkan bagaimana legitimasi tidak hanya diperoleh dari jabatan formal, melainkan juga dari pengakuan sosial dan kultural dari warga desa. Sementara itu, kerangka Fraser menegaskan bahwa kepemimpinan perempuan tidak cukup dilihat dari jumlah representasi, melainkan juga membuka ruang pengakuan bagi kelompok rentan serta mendistribusikan sumber daya secara lebih adil.

Pada teori strukturasi Giddens memperlihatkan bagaimana kepemimpinan perempuan bekerja dalam hubungan dialektis antara struktur dan agensi. Struktur yang bias gender memang membatasi ruang gerak, namun pada saat yang bersamaan juga menjadi medium transformasi melalui tindakan reflektif. Studi ini juga dimaksudkan untuk menghasilkan dan membangun pemahaman kritis dan teoritis tentang praktik transformasi sosial dan aktor perempuan dalam medan kekuasaan lokal. Selain itu juga berupaya untuk mengungkap mengapa dan bagaimana praktik-praktik kepemimpinan perempuan di desa dapat bekerja secara emansipatoris di tengah struktur sosial yang maskulin dan hierarkis. Dengan demikian, metode yang digunakan bersifat reflektif dan analitis terhadap relasi kuasa, simbol, dan transformasi sosial dari bawah.

Proses analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara bertahap melalui teknik *coding* dan kategorisasi untuk mengubah data mentah dari wawancara, observasi, dan telaah dokumen menjadi temuan yang bermakna. Tahap awal dilakukan *open coding* dengan membaca ulang transkrip wawancara dan catatan observasi untuk menemukan kata kunci dan pola tindakan terkait kepemimpinan perempuan, seperti ungkapan “ramah,” “terbuka,” atau “mengajak bicara semua pihak.” Selanjutnya dilakukan *axial coding* dengan mengelompokkan kode awal ke dalam kategori yang lebih besar, misalnya “strategi inklusi,” “negosiasi politik,” dan “pemberdayaan ekonomi perempuan,” sambil membandingkan data dari kepala desa, perangkat, tokoh adat, dan kelompok rentan. Tahap akhir adalah *selective coding*, yaitu memilih kategori inti yang relevan dengan kerangka teori, sehingga “strategi inklusi” dapat dianalisis dengan konsep *recognition* Fraser (2000), “negosiasi politik” dengan modal simbolik Bourdieu (1990), dan “praktik keseharian” dengan strukturasi Giddens (1984).

III. Hasil dan Pembahasan

3.1. Kondisi Demografis dan Geografis Desa Purwo Bhakti

Desa Purwo Bhakti terletak di Kecamatan Bathin III, Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi. Secara geografis, desa ini berada di kawasan dataran rendah dengan struktur tanah relatif subur dan kontur wilayah yang landai, menjadikannya ideal untuk pengembangan pertanian dan permukiman. Akses jalan menuju desa cukup baik, menghubungkan wilayah ini dengan pusat kabupaten serta jalur-jalur distribusi hasil pertanian dan perkebunan di sekitarnya. Desa ini juga berada tidak jauh dari kawasan hutan produksi dan transmigrasi, yang menciptakan dinamika ruang hidup yang khas: antara ruralitas dan mobilitas, antara komunitas agraris dan pengaruh eksternal dari program-program pembangunan. Keunggulan letak geografis ini telah berkontribusi pada peningkatan konektivitas desa, tetapi juga membawa tantangan ekologis dan sosial tersendiri, termasuk dalam pengelolaan sumber daya alam dan tata ruang.

Dari sisi luas wilayah, Desa Purwo Bhakti mencakup sekitar 1.078 hektar, dengan zonasi lahan yang terbagi ke dalam area pertanian, kebun rakyat, permukiman, serta

sebagian kecil kawasan lindung. Lahan pertanian di desa ini didominasi oleh komoditas karet dan sawit, disusul oleh tanaman pangan lokal seperti padi ladang, jagung, dan ubi kayu. Selain itu, beberapa kelompok warga juga memanfaatkan pekarangan untuk kegiatan hortikultura berskala rumah tangga, seperti menanam cabai, tomat, dan terong. Sebagian besar aktivitas ekonomi berbasis pada kerja keluarga, dengan pembagian peran yang kuat antara perempuan dan laki-laki dalam siklus produksi dan reproduksi. Akses terhadap air bersih dan listrik tergolong baik, meskipun sebagian dusun masih mengalami kendala dalam pengolahan sanitasi dan pengelolaan sampah secara kolektif.

Secara demografis, desa ini dihuni oleh lebih dari 1.300 jiwa yang terbagi ke dalam lima Rukun Tetangga (RT) dan dua Rukun Warga (RW). Komposisi etnik desa sangat beragam, terdiri dari warga transmigran asal Jawa, komunitas lokal Jambi, serta minoritas dari etnik Minangkabau, Batak, dan sebagian kecil etnik Sunda dan Bugis. Keberagaman ini bukan hanya tampak pada nama-nama keluarga dan adat istiadat, tetapi juga dalam praktik sosial sehari-hari seperti pola konsumsi, kegiatan keagamaan, dan struktur organisasi sosial. Keberagaman tersebut menciptakan kebutuhan akan kepemimpinan yang lentur, kolaboratif, dan mampu menjembatani keragaman identitas tanpa melanggengkan dominasi kultural satu kelompok atas yang lain. Dalam konteks ini, pluralitas menjadi bukan sekadar fakta statistik, melainkan dinamika sosial yang secara terus-menerus dinegosiasikan di ruang publik desa.

Latar belakang sejarah desa ini turut mempengaruhi dinamika sosial dan konfigurasi kekuasaan. Desa Purwo Bhakti merupakan salah satu hasil dari program transmigrasi pada era Orde Baru, yang secara sengaja mendesain pemukiman baru di lahan kosong untuk tujuan redistribusi penduduk dan pembukaan lahan pertanian. Dalam konteks itu, tidak ada satu komunitas etnik yang memiliki legitimasi kultural secara absolut, karena semua kelompok adalah "pendatang" dalam arti struktural. Situasi ini menciptakan struktur sosial yang relatif egaliter, terbuka terhadap transformasi, dan minim resistensi terhadap kepemimpinan berdasarkan identitas tunggal. Dengan demikian, kemunculan pemimpin perempuan dalam konteks ini tidak ditanggapi sebagai pelanggaran norma adat, tetapi sebagai hasil dari ruang sosial yang longgar dan terbuka terhadap meritokrasi lokal. Di sisi lain, dinamika ini tetap menyisakan ketegangan antar-kelompok, terutama terkait akses terhadap sumber daya dan distribusi manfaat pembangunan.

Kondisi geografis dan demografis yang khas inilah yang kemudian menjadi medan sosial tempat Lenny Maryani membangun kepemimpinannya. Ia tidak hanya berhadapan dengan urusan administratif dan pembangunan infrastruktur, tetapi juga dengan kompleksitas sosial dari komunitas multietnis yang memiliki kebutuhan dan kepentingan berbeda. Dengan pendekatan berbasis empati, inklusi, dan partisipasi, Lenny mampu menavigasi dinamika ini melalui strategi pelayanan sosial yang merata, penyusunan forum musyawarah yang terbuka, serta pengakuan simbolik terhadap keberagaman yang ada. Dalam logika Bourdieuan, medan sosial di Purwo Bhakti adalah ruang di mana kepemimpinan perempuan berpeluang muncul karena struktur sosialnya tidak didominasi secara eksklusif oleh satu bentuk kapital simbolik, melainkan dapat dinegosiasikan melalui kerja sosial dan modal kultural. Oleh karena itu, konteks demografis dan geografis ini tidak hanya menjadi latar pasif, tetapi elemen aktif dalam membentuk struktur peluang dan resistensi atas kepemimpinan perempuan di tingkat desa.

3.2. Kepemimpinan Perempuan dan Transformasi Struktur

Kepemimpinan kepala desa perempuan di Desa Purwo Bhakti merupakan fenomena sosial yang tidak dapat dilepaskan dari konteks struktur sosial patriarkal yang mengakar. Kita bisa memahami bahwa posisi Lenny sebagai kepala desa perempuan bukan semata hasil dari kebijakan afirmatif, tetapi merupakan sebagai salah satu bentuk agensi transformatif. Kepemimpinannya dapat kita maknai sebagai bentuk ruang artikulasi kekuasaan dalam bentuk baru: kolaboratif, inklusif, dan berbasis relasi kepercayaan. Maka selain berfungsi sebagai simbol keterwakilan perempuan, keberadaan kepala desa perempuan juga dapat dipahami sebagai bentuk transformasi struktur kekuasaan di tingkat lokal.

Konsep habitus dari Bourdieu (1990) sangat membantu dalam menjelaskan bagaimana Lenny selaku kepala desa perempuan bekerja melampaui ekspektasi sosial yang cenderung menempatkan perempuan sebagai aktor domestik dan pendukung laki-laki dalam ranah publik. Dengan habitus yang terbentuk dari pengalaman sebagai tenaga kesehatan dan istri aparat negara, ia mengembangkan gaya kepemimpinan yang lebih partisipatif dibanding gaya dominan laki-laki yang bersifat top-down. Ia menghindari dominasi simbolik dalam bentuk retorika otoriter, dan menggantinya dengan pendekatan komunikatif yang membangun rasa keterlibatan warga. Dalam praktiknya, hal ini terlihat dari kebiasaannya memulai musyawarah dengan mendengar suara kelompok rentan dan marginal terlebih dahulu.

Dari kacamata teori strukturasi Giddens (1984), praktik kepemimpinan Lenny menunjukkan adanya dinamika simultan antara struktur dan agensi. Ia bekerja dalam struktur yang mengandung aturan dan sumber daya yang bias gender, namun secara bertahap mengubah struktur tersebut melalui praktik keseharian—seperti menempatkan mantan rival politik sebagai perangkat desa, membuka forum warga yang setara, dan mendirikan perpustakaan desa sebagai ruang belajar bersama. Proses ini memperlihatkan bagaimana agensi tidak bersifat bebas sepenuhnya, tetapi juga tidak ditentukan sepenuhnya oleh struktur. Kepemimpinan Lenny menjadi contoh konkret dari “transformasi dari dalam” yang dilakukan melalui negosiasi dan inovasi kultural.

Transformasi struktur ini juga tergambar dalam dokumen RPJMDes dan APBDes Purwo Bhakti, yang dalam dua tahun terakhir menunjukkan peningkatan signifikan dalam alokasi anggaran untuk kegiatan pendidikan warga, pelatihan perempuan, dan program inklusi sosial. Dalam wawancara, Lenny menyatakan bahwa ia secara sengaja memasukkan indikator keterlibatan perempuan dan disabilitas sebagai bagian dari ukuran keberhasilan program desa. Dengan demikian, kepemimpinan Lenny bukan hanya menjalankan roda pemerintahan desa, tetapi juga menggeser arah pembangunan desa agar lebih sensitif terhadap ketimpangan sosial yang sebelumnya tak terlihat. Ini adalah bentuk resistensi terhadap struktur yang berjalan secara halus, tetapi berdampak nyata.

Kepemimpinan Lenny juga perlu dipahami dalam konteks relasi kuasa yang bersifat multilevel—yakni antara pemerintah desa dengan pemerintah kabupaten, antara kepala desa dengan perangkat, serta antara elite desa dengan warga biasa. Dalam struktur relasi semacam ini, perempuan sering kali tersisih dari proses negosiasi formal yang berlangsung dalam struktur birokrasi dan politik anggaran. Namun Lenny menunjukkan kemampuan untuk masuk ke dalam arena tersebut dengan membangun jejaring lintas level secara informal, misalnya dengan mendekati TAPM kabupaten dan dinas pemberdayaan

masyarakat setempat untuk menjelaskan program-program yang berbasis inklusi sosial. Strategi ini mencerminkan penggunaan *modal simbolik* (Bourdieu, 1990), di mana legitimasi sosial diperoleh bukan karena dominasi formal, tetapi karena pengakuan kultural dan kepercayaan sosial yang dibangun secara terus-menerus.

Proses ini semakin terlihat signifikan dalam cara Lenny membangun kesadaran warga bahwa pemerintahan desa bukanlah institusi yang berada “di atas” masyarakat, melainkan bagian dari kehidupan kolektif. Dalam salah satu wawancara, seorang perangkat desa menyebut bahwa Lenny “tidak segan meminjamkan rumahnya untuk kegiatan posyandu ketika kantor desa sedang direnovasi.” Tindakan semacam ini—meski sederhana—merupakan bentuk performatif dari kepemimpinan etis yang menolak hierarki simbolik antara pejabat dan warga. Dalam istilah Joan Tronto (1993), praktik tersebut dapat dibaca sebagai bentuk *care ethics* dalam kepemimpinan—yakni orientasi pada kedekatan, empati, dan relasi manusiawi, yang selama ini dianggap bukan bagian dari logika kepemimpinan “rasional” di desa.

Dalam wawancara dengan Pendamping Lokal Desa (PLD), disebutkan bahwa gaya kepemimpinan Lenny telah memicu perubahan cara pandang masyarakat terhadap posisi perempuan. Jika sebelumnya perempuan dianggap hanya “membantu” di PKK atau PAUD, kini warga mulai melihat perempuan sebagai pengambil keputusan yang sah dan efektif. Hal ini menunjukkan bahwa praktik kepemimpinan tidak hanya berdampak pada kebijakan, tetapi juga memiliki efek simbolik terhadap struktur kognitif masyarakat. Dalam terminologi Giddens (1984), ini adalah bentuk *refleksivitas struktur*, di mana struktur sosial berubah karena aktor-aktor sosial mulai memaknai kembali peran dan identitas dalam kerangka baru. Dengan kata lain, Lenny tidak hanya menjalankan kepemimpinan; ia sedang membentuk kembali struktur sosial melalui praktik harian yang terus-menerus menginterogasi norma-norma dominan.

3.3. Produksi Ruang Inklusi dan Politik Pengakuan

Salah satu dimensi paling signifikan dari kepemimpinan Lenny Maryani di Desa Purwo Bhakti adalah kemampuannya membangun *ruang inklusi* sebagai arena baru bagi partisipasi warga. Ruang ini bukan hanya secara fisik diwujudkan melalui perpustakaan desa, ruang belajar bersama, dan kantor terbuka, tetapi juga secara sosial melalui perubahan relasi kuasa dan partisipasi antarwarga. Dalam perspektif sosiologi kritis, keberadaan ruang ini dapat dipahami sebagai hasil dari intervensi terhadap struktur sosial yang eksklusif, di mana partisipasi selama ini dibatasi oleh kelas, gender, atau kedekatan dengan elite desa (Fraser, 2000). Dengan membuka ruang-ruang interaksi yang menyambut semua pihak, termasuk kelompok rentan seperti perempuan kepala keluarga dan penyandang disabilitas, Lenny secara aktif mereproduksi makna baru tentang siapa yang berhak hadir dan bersuara dalam pemerintahan desa.

Kantor desa yang dulunya menjadi simbol jarak antara negara dan warga, kini mengalami transformasi menjadi *ruang sosial* yang cair, terbuka, dan tidak menakutkan. Observasi lapangan menunjukkan bahwa pintu kantor desa jarang tertutup, bahkan dalam jam istirahat, karena kepala desa maupun perangkat biasa melayani warga secara informal. Bahkan, warga dari latar belakang berbeda—baik etnis, agama, maupun status sosial—terlihat leluasa keluar masuk tanpa merasa harus “diundang”. Hal ini merupakan wujud konkret dari apa yang disebut Nancy Fraser sebagai praktik “redistribusi dan pengakuan”

yang berjalan simultan: membuka akses terhadap sumber daya, sekaligus mengafirmasi identitas dan eksistensi warga sebagai subjek politik yang setara (Fraser, 2000).

Ruang inklusi tidak hanya bersifat fisik, tetapi juga simbolik. Salah satu praktik menarik adalah cara Lenny melibatkan mantan rival politiknya dalam tim perangkat desa. Tindakan ini, meskipun mengandung risiko politik, mencerminkan *politik pengakuan* berbasis rekonsiliasi, bukan eksklusi. Alih-alih memperkuat barisan loyalis dan menciptakan oposisi permanen, Lenny memilih untuk merangkul perbedaan sebagai modal sosial. Hal ini sejalan dengan prinsip *deliberatif* dalam demokrasi lokal, di mana perbedaan dijadikan titik tolak untuk negosiasi kepentingan, bukan dasar untuk eksklusi (Young, 2000). Praktik ini juga memperluas *legitimasi kultural* yang dibutuhkan oleh seorang kepala desa perempuan dalam konteks sosial yang maskulin dan hierarkis.

Salah satu inovasi paling penting dalam upaya produksi ruang inklusi di desa ini adalah penguatan kader inklusi desa, yang bekerja mendeteksi dan mendampingi warga dari kelompok rentan—seperti penyandang disabilitas, perempuan lansia, dan rumah tangga miskin. Melalui wawancara, salah satu kader menyatakan bahwa ia secara rutin mendatangi rumah warga untuk memastikan apakah mereka memiliki akses terhadap informasi dan layanan dasar. Dalam konteks ini, ruang inklusi tidak hanya dibangun di balai desa, tetapi juga “dibawa” ke rumah-rumah warga. Ini merupakan praktik nyata dari *etika kepedulian* (Tronto, 1993) yang menekankan pentingnya hubungan, kehadiran langsung, dan tanggung jawab sosial dalam kepemimpinan berbasis nilai.

Ruang inklusi ini juga berdampak pada cara warga memaknai posisi kepala desa. Salah satu warga disabilitas menyatakan bahwa “baru kali ini kantor desa terasa milik semua orang, bukan cuma tempat orang-orang penting.” Pernyataan ini, meskipun sederhana, menyiratkan pergeseran struktur simbolik dalam memandang kekuasaan. Jika sebelumnya kantor desa adalah tempat yang bersifat eksklusif, kini ia menjadi ruang publik yang memungkinkan artikulasi pengalaman, keluhan, dan harapan dari kelompok yang selama ini tidak terdengar. Dalam hal ini, ruang inklusi bukan hanya instrumen kebijakan, tetapi juga arena produksi makna yang menginterogasi relasi kuasa yang ada (Lefebvre, 1991).

Dengan menciptakan ruang-ruang inklusi yang terbuka dan partisipatif, Lenny tidak hanya memperluas akses formal terhadap lembaga desa, tetapi juga membangun *legitimasi simbolik* sebagai pemimpin yang dekat, dapat dipercaya, dan mewakili aspirasi kelompok rentan. Ini menjadi penting karena dalam masyarakat desa, legitimasi sering kali tidak dibangun melalui indikator administratif, melainkan melalui *gestur sosial*, *kesediaan mendengar*, dan *kehadiran fisik* dalam peristiwa-peristiwa warga. Dalam konteks ini, kepemimpinan Lenny mengandung dimensi kultural yang kuat dan menawarkan model alternatif dari praktik kekuasaan di desa—yakni kekuasaan yang berakar pada keterlibatan dan pengakuan sosial, bukan semata-mata pada otoritas formal.

3.4. Modal Sosial dan Strategi Simbolik dalam Negosiasi Kuasa

Dalam konteks pemerintahan desa, di mana birokrasi formal bercampur erat dengan struktur sosial tradisional, keberhasilan seorang pemimpin sering kali ditentukan oleh kemampuannya mengelola modal sosial dan membentuk legitimasi di luar kerangka prosedural. Kepemimpinan Lenny Maryani di Desa Purwo Bhakti memperlihatkan bagaimana modal sosial digunakan bukan hanya sebagai sarana pelengkap administratif, tetapi sebagai fondasi utama untuk memperkuat kekuasaan simbolik. Ia tidak hanya

menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan, tetapi juga memelihara dan memperluas jaringan kepercayaan yang menyatukan warga dari latar belakang etnis, agama, dan kelas sosial yang berbeda (Coleman, 1990; Putnam, 1993).

Modal sosial yang dimiliki Lenny bersumber dari tiga hal utama: kedekatan dengan warga, rekam jejak pengabdian di sektor kesehatan, dan posisi sosialnya sebagai bagian dari keluarga aparat negara yang disegani. Kombinasi ini memungkinkan dirinya memperoleh legitimasi dari berbagai segmen masyarakat desa, baik formal maupun informal. Namun yang menjadikannya menonjol bukanlah asal-usul modal itu sendiri, melainkan bagaimana ia secara aktif mereproduksi dan mendistribusikannya melalui tindakan yang simbolik. Misalnya, dalam setiap kegiatan desa, Lenny memilih duduk bersama warga alih-alih di podium atau kursi istimewa. Tindakan ini mungkin tampak sederhana, tetapi dalam kerangka Bourdieu (1990), ini adalah bentuk *symbolic reversal*—yakni pelepasan dari hierarki simbolik demi membangun otoritas yang berbasis relasi, bukan dominasi.

Strategi simbolik lainnya tampak dalam cara Lenny menggunakan bahasa tubuh, simbol kultural, dan bahkan pakaian dalam menghadiri forum-forum publik. Ia kerap mengenakan busana lokal atau pakaian kerja sederhana, dan menghindari citra elitis yang biasa melekat pada pemimpin formal. Dalam wawancara, seorang kader inklusi menyebut bahwa *“Bu Rio (Sebutan lokal untuk Kepala Desa) itu seperti tetangga biasa, bukan kayak pejabat.”* Pernyataan ini menggambarkan betapa pentingnya aspek simbolik dalam membangun kedekatan sosial, terutama dalam masyarakat desa yang sensitif terhadap isyarat-isyarat status. Dalam terminologi Gramsci (1971), hal ini bisa dibaca sebagai kontra-hegemoni simbolik, di mana kekuasaan tidak dioperasikan melalui peneguhan struktur dominan, tetapi justru dengan mendekonstruksi simbol-simbol kekuasaan itu sendiri.

Namun demikian, distribusi modal sosial tidak berlangsung dalam ruang yang hampa konflik. Sebagai kepala desa perempuan, ia juga harus berhadapan dengan elite laki-laki desa yang terbiasa menguasai jalur informal distribusi kekuasaan, terutama dalam urusan pembangunan fisik dan pengelolaan anggaran. Dalam wawancara, seorang perangkat desa menyebut adanya ketegangan antara Lenny dan tokoh adat saat ia mengusulkan pembangunan ruang komunitas untuk kelompok rentan yang sebelumnya tidak menjadi prioritas. Dalam konteks ini, Lenny tidak melawan secara frontal, tetapi memilih strategi simbolik: mengundang tokoh adat sebagai “pembina” program inklusi untuk menciptakan *kooptasi dialogis*. Ini adalah bentuk negosiasi kuasa yang menggabungkan *modal simbolik* dan *modal relasional* untuk melemahkan resistensi struktural tanpa menimbulkan konflik terbuka.

Ketika modal sosial dipertaruhkan dalam pengambilan keputusan yang tidak populer—misalnya dalam penataan ulang perangkat desa atau alokasi anggaran untuk perpustakaan daripada pembangunan jalan—Lenny mengandalkan narasi kolektif dan nilai-nilai keadilan sosial untuk memperkuat posisinya. Ia tidak menggunakan argumen teknokratik semata, melainkan membingkai kebijakan sebagai bagian dari “merawat bersama desa ini.” Dalam forum Musrenbang Desa, ia memulai sambutan bukan dengan laporan kinerja, tetapi dengan cerita tentang seorang ibu kepala keluarga yang kini aktif di perpustakaan desa. Narasi ini bukan sekadar retorika, melainkan alat untuk membangun solidaritas bersama yang mengikat warga dalam kerangka nilai yang bersifat afektif dan sosial.

Kepemimpinan Lenny menunjukkan bahwa dalam ruang desa yang masih sarat nilai

patriarkal, perempuan tidak hanya bisa “ikut serta,” tetapi juga dapat memimpin dengan strategi yang sesuai dengan konteks sosial dan budaya setempat. Modal sosial di sini tidak dimobilisasi untuk melanggengkan dominasi, tetapi justru digunakan untuk memperluas ruang pengakuan bagi kelompok yang selama ini terpinggirkan. Dalam sosiologi kritis, hal ini dapat dibaca sebagai bentuk *emansipasi dari bawah*—sebuah praktik yang menggabungkan tindakan simbolik, jaringan sosial, dan kepekaan terhadap struktur untuk menciptakan perubahan yang berkelanjutan dan bermakna (Burawoy, 2005). Dengan kata lain, Lenny bukan hanya kepala desa perempuan; ia adalah arsitek sosial dari transformasi simbolik di tingkat desa.

Dalam konteks masyarakat desa yang ditandai oleh kerapuhan institusional dan kuatnya relasi informal, strategi simbolik menjadi arena kunci dalam membentuk legitimasi. Lenny memahami bahwa birokrasi desa tidak bekerja secara linier seperti di kota—ia dijalankan melalui “jaringan kepercayaan” yang bersifat lentur, penuh kompromi, dan sarat makna budaya. Oleh karena itu, ia tidak hanya berfokus pada aspek prosedural seperti penyusunan dokumen dan laporan, tetapi juga pada aspek relasional: hadir dalam hajatan warga, mendengarkan keluhan di warung kopi, dan merespons krisis dengan kehadiran fisik. Dalam bingkai Bourdieu (2001), ini adalah bentuk investasi pada *kapital simbolik*, yang meskipun tidak selalu kasat mata, namun menjadi fondasi penting dalam memelihara legitimasi sosial. Kehadiran secara simbolik ini menumbuhkan apa yang disebut Putnam (1993) sebagai “kepercayaan horisontal” yang memperkuat kohesi sosial dan meningkatkan efektivitas pemerintahan.

Lebih dari itu, strategi simbolik Lenny berfungsi sebagai bentuk “politik representasi alternatif” dalam konteks sosial yang membatasi peran perempuan dalam kekuasaan. Ia tidak mendefinisikan ulang kepemimpinan dengan meniru gaya dominan laki-laki, ia lebih membentuk logika baru kepemimpinan yang bersandar pada kedekatan, keberdayaan, dan rekognisi. Dalam setiap forum publik, selain mengundang elite desa, ia juga mengundang kelompok yang jarang diikutsertakan—perempuan petani, remaja perempuan, hingga lansia penyandang disabilitas. Ruang-ruang ini menjadi penting karena menghadirkan praktik *counter-publics* (Fraser, 1990), yakni ruang diskursif alternatif tempat kelompok yang selama ini terpinggirkan dapat membangun artikulasi politiknya sendiri. Dengan demikian, kepemimpinan Lenny dapat dibaca sebagai bentuk artikulasi politik mikro yang menegosiasikan ulang siapa yang dihitung, siapa yang didengar, dan siapa yang dianggap layak menjadi bagian dari komunitas politik desa.

IV. Kesimpulan dan Rekomendasi

Studi ini secara eksplisit menunjukkan bahwa kepemimpinan perempuan di tingkat desa tidak sekadar menjadi pengisi kuota representasi gender, melainkan dapat menjadi aktor kunci dalam proses transformasi sosial yang berlangsung secara simultan di ranah simbolik, relasional, dan struktural. Dalam kasus Lenny Maryani di Desa Purwo Bhakti, kita melihat bahwa perempuan tidak hanya “mampu” memimpin, tetapi juga merekonstruksi ulang praktik kepemimpinan yang selama ini didominasi oleh nilai-nilai maskulin dan teknokratik. Dengan pendekatan yang kolaboratif, partisipatif, dan berbasis nilai-nilai lokal seperti gotong royong dan empati, Lenny berhasil menggeser paradigma kepemimpinan desa dari yang semula berbasis komando menjadi berbasis kedekatan sosial dan pengakuan relasional.

Ini merupakan bentuk artikulasi baru dari kekuasaan, yang tidak didasarkan pada superioritas simbolik atau kontrol administratif, tetapi pada kapasitas untuk membangun jejaring sosial yang inklusif dan memproduksi legitimasi dari bawah.

Kepemimpinan perempuan di Purwo Bhakti dapat dipahami sebagai praktik emansipatoris yang menantang struktur patriarkal melalui cara-cara subtil dalam keseharian. Melalui pendekatan yang kolaboratif dan berbasis nilai-nilai lokal, Lenny Maryani berhasil membongkar batas-batas eksklusivitas institusi desa yang selama ini berjarak dari warga. Ia membuka ruang partisipasi bagi kelompok rentan, menginisiasi forum bagi remaja, serta menjadikan kantor desa sebagai ruang publik yang ramah bagi penyandang disabilitas. Langkah-langkah ini menunjukkan bahwa kepemimpinan perempuan tidak hanya berfokus pada manajemen administratif, tetapi juga pada penciptaan ruang sosial yang inklusif, tempat warga dapat memaknai diri mereka sebagai subjek politik yang aktif. Dengan demikian, ruang-ruang inklusi yang tercipta—baik secara fisik maupun simbolik—berfungsi ganda, sebagai wadah penyampaian aspirasi sekaligus sebagai arena pembentukan identitas politik baru yang memperkuat proses demokratisasi di tingkat lokal.

Praktik kepemimpinan tersebut juga memperlihatkan bahwa kekuasaan dapat dijalankan secara produktif ketika dilepaskan dari logika dominasi yang maskulin. Alih-alih menekankan hierarki atau kontrol semata, kekuasaan dalam kepemimpinan perempuan dimaknai sebagai kemampuan untuk membangun pengakuan, memperluas partisipasi, dan menumbuhkan relasi afektif yang mempererat solidaritas sosial. Dari sini terlihat bahwa agensi perempuan tidak hanya hadir dalam gerakan politik makro atau mobilisasi massa, tetapi juga dalam tindakan sehari-hari yang mereformulasi makna kepemimpinan itu sendiri di ruang lokal yang konkrit. Studi ini dengan demikian memberikan kontribusi penting dalam memahami kepemimpinan perempuan di desa, yakni sebagai kekuatan transformatif yang mampu menghadirkan bentuk tata kelola baru—lebih adil, lebih manusiawi, dan lebih partisipatif—yang tumbuh dari praktik sosial keseharian.

Berdasarkan temuan dan analisis tersebut, maka sejumlah rekomendasi konseptual dan praktis dapat diajukan. Pertama, dari segi pendekatan ilmiah, kajian tentang kepemimpinan perempuan di desa perlu bergerak melampaui statistik keterwakilan, dan masuk pada wilayah analisis relasional-kultural, untuk memahami bagaimana praktik kekuasaan dijalankan, dinegosiasikan, dan direproduksi dalam konteks sosial yang kompleks. Kajian sosiologi gender, sosiologi organisasi, serta studi post-kolonial dapat menjadi perspektif yang memperkaya pembacaan ini. Kedua, dari sisi kebijakan, program seperti P3PD dan afirmasi gender di desa harus disertai dengan kerangka pendampingan yang tidak semata-mata menyiapkan teknis perencanaan, tetapi juga memperkuat kapasitas reflektif dan sensitivitas sosial dari para pemimpin perempuan di desa. Pelatihan kepemimpinan yang mengintegrasikan pendekatan etika kepedulian dan strategi transformasi sosial menjadi sangat penting untuk mendukung keberlanjutan peran perempuan dalam kepemimpinan desa.

Ketiga, untuk tingkat praksis dan kelembagaan, pengalaman Desa Purwo Bhakti dapat dijadikan sebagai salah satu model praktik baik (*best practice*) yang perlu didokumentasikan dan didiseminasi secara sistematis. Pemerintah daerah, organisasi masyarakat sipil, maupun lembaga donor dapat mendorong replikasi konteksual dari praktik-praktik serupa, dengan tetap memperhatikan dinamika lokal dan modal sosial yang tersedia. Forum pembelajaran antar-desa berbasis pengalaman nyata akan sangat berguna untuk memperluas cakupan

pengaruh dari inovasi kepemimpinan perempuan ini. Keempat, penting untuk merancang sistem insentif institusional, baik berupa alokasi dana afirmatif maupun pengakuan publik, bagi desa-desa yang berkomitmen pada prinsip inklusivitas dan keadilan sosial. Dengan menciptakan insentif yang terstruktur, keberhasilan seperti yang dicapai oleh Lenny tidak hanya menjadi kisah inspiratif individual, tetapi juga menjadi kebijakan yang didorong secara sistemik dan kolektif.

Dengan demikian, kepemimpinan perempuan di desa—sebagaimana diperlihatkan oleh pengalaman Lenny Maryani di Purwo Bhakti—tidak dapat lagi dipandang sebagai anomali dalam struktur kekuasaan desa yang maskulin, melainkan sebagai potensi transformasional yang perlu dirawat dan diperluas. Kepemimpinan ini tidak hanya berorientasi pada pencapaian administratif atau pembangunan infrastruktur, tetapi juga pada kerja sosial yang lebih mendalam: membangun rasa memiliki, memperkuat solidaritas lintas identitas, serta meruntuhkan sekat-sekat sosial yang membatasi partisipasi warga. Studi ini menunjukkan bahwa desa bukan sekadar ruang geografis atau unit administratif, melainkan medan perjuangan simbolik di mana nilai-nilai inklusivitas, pengakuan, dan keadilan sosial dapat direalisasikan melalui praktik kepemimpinan perempuan. Dengan menempatkan desa sebagai lokus utama transformasi sosial, penelitian ini sekaligus menegaskan bahwa upaya demokratisasi dan penguatan masyarakat sipil tidak hanya dapat digerakkan dari pusat, tetapi juga dari ruang-ruang lokal yang dihidupi oleh praktik sehari-hari yang sederhana namun berdampak luas.

Daftar Pustaka

- Bourdieu, P. (1990). *The Logic of Practice*. Stanford University Press.
- Bourdieu, P. (1993). *Language and Symbolic Power*. Harvard University Press.
- Cornwall, A., & Edwards, J. (2010). *Introduction: Negotiating empowerment*. IDS Bulletin, 41(2), 1–9.
- Escobar, A. (2012). *Encountering Development: The Making and Unmaking of the Third World*. Princeton University Press.
- Fraser, N. (2000). *Rethinking recognition*. New Left Review, 3, 107–120.
- Fraser, N. (2008). *Scales of Justice: Reimagining Political Space in a Globalizing World*. Polity Press.
- Giddens, A. (1984). *The Constitution of Society: Outline of the Theory of Structuration*. University of California Press.
- Gramsci, A. (1971). *Selections from the Prison Notebooks* (Q. Hoare & G. Nowell Smith, Eds. & Trans.). International Publishers.
- Guba, Egon G., & Lincoln, Yvonna S. (1994). *Competing Paradigms in Qualitative Research*. Thousand Oaks, CA: SAGE Publications.
- Handayani, F. Y, Unti. L & Ali. M. (2024). *Kepemimpinan Kepala Desa Perempuan: Kajian Konstruksi Sosial Kepemimpinan Kepala Perempuan Desa*. Brawijaya Journal of Social Change, 3(2), 110-126.
- Hardini, Indah. P. (2024). *Fenomena Kepala Desa Perempuan Tiga Periode di Desa Domas*

- Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik (Studi tentang Kepemimpinan Perempuan dan Legitimasinya)*. *Journal Politique*, 4 (2), 203-228.
- Holilah. (2014). Pandangan dan dukungan masyarakat terhadap kepemimpinan kepala desa perempuan: Studi kasus di Desa Taras Padang, Hulu Sungai Tengah. *Jurnal Gender dan Sosial*, 9(1), 43-55.
- Levebre, H. (1991). *The Production of Space*. USA. Blackwell.
- Nurhafizah, S., Zainul. A & Suroto. (2021). *Pandangan dan Dukungan Masyarakat Terhadap Kepemimpinan Kepala Desa Perempuan (Studi Kasus: Desa Taras Padang, Kecamatan Labuan Amas Selatan, Kabupaten Hulu Sungai)*. *Jurnal Publikasi Berkala Pendidikan Ilmu Sosial*, 1(2), 81-93
- Nusaibah, P & Mu'tashim. B. (2023). *Kepemimpinan Perempuan di Ruang Publik Perspektif Islam: Studi di Desa Binjai Baru Kecamatan Datuk Tanah Datar Kabupaten Batubara*. *Jurnal Agama dan Hak Asasi Manusia: In Right*, 12(1), 101-120.
- Nussbaum, M. C. (2000). *Women and Human Development: The Capabilities Approach*. Cambridge University Press.
- Prasetyoningsih, D. & Agus, S. A. (2016). *Strategi Perempuan Kepala Desa dalam Menerapkan Gaya Kepemimpinan yang Demokratis di Desa Kendal Sewu, Kecamatan Tarik, Kabupaten Sidoarjo*. *Kajian Moral dan Kewarganegaraan*, 3(4), 1136-1152.
- Rodil, V. N., Bernal, F. A. A., Buena, M. C. S., Pedregosa, A. G., Dela Cruz, S. B., & Cantela, S. R. C. (2019). *Gender based differentiation among the elected Barangay officials in the First District of Cavite*. Cavite State University–Cavite City Campus.
- Saputra, Kiki & Alia. A. (2021). *Kepemimpinan Kepala Desa Perempuan (Studi Kasus di Desa Maliki Air, Kota Sungai Penuh, Jambi)*. *Journal of Civic Education*, 4(1), 57-65.
- Scott, J. C. (1998). *Seeing Like a State: How Certain Schemes to Improve the Human Condition Have Failed*. Yale University Press.
- Sultana, A. M. (2012). *Patriarchy and women's subordination: A theoretical analysis*. *Arts Faculty Journal*, 4(1), 1-18.
- Tronto, J. C. (2020). *Moral Boundaries: A Political Argument for an Ethic of Care*. Routledge.
- Yin, Robert K. (2014). *Case Study Research: Design and Methods* (5th ed.). Thousand Oaks, CA: SAGE Publications.